BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN
NEGERI ENDE**

3.1 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Ende

Kejaksaan Negeri Ende merupakan salah satu unsur pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berada dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian integral dari sistem Kejaksaan yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang bekerja secara terpadu dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Kejaksaan Negeri Ende memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh Kabupaten Ende dan berkedudukan di pusat kota Kabupaten Ende, tepatnya di Jalan Eltari No. 3, Kecamatan Ende Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Negeri Ende tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara pidana, tetapi juga bertindak mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Saat ini, Kejaksaan Negeri Ende dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, S.H., M.H., yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga dalam wilayah hukumnya.

3.1.1 Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2025 bersama informan Rohmat Esa Hasan sebagai Kasubsi Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ende, beliau menjelaskan bahwa, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Ende sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Ende bertugas menuntaskan perkara pidana, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan, serta melaksanakan penetapan dan keputusan pengadilan.
2. Kejaksaan Negeri Ende mewakili Pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.
3. Kejaksaan Negeri Ende turut menyelenggarakan kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan pengawasan aliran kepercayaan.
4. Kejaksaan Negeri Ende juga berperan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, serta melakukan mediasi penal.

3.1.2 Wewenang Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 juni 2025 dengan informan Jaksa Penuntut Umum Dewa Kadek Dwi Naro Sigito, diketahui bahwa:

“Kejaksaan Negeri memang memiliki kewenangan yang sangat penting dalam penanganan perkara pidana. Semua prosesnya kami jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Di Kejaksaan Negeri Ende, jaksa menjalankan tiga fungsi utama, yaitu penuntutan perkara pidana, penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pertama, dalam fungsi penuntutan, jaksa berwenang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, seperti dalam kasus pencurian atau penganiayaan. Kedua, jaksa dapat menghentikan penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, sesuai Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketiga, jaksa berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, memastikan eksekusi hukuman berjalan sesuai aturan. Secara keseluruhan, peran jaksa di Kejaksaan Negeri Ende sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, cepat, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan, jaksa di Kejaksaan Negeri Ende memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penanganan perkara pidana berjalan secara adil, cepat, dan sesuai hukum, baik melalui proses peradilan maupun pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

3.2 Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama

dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda. Kasus penganiayaan dikategorikan sebagai delik aduan, artinya proses hukumnya bergantung pada laporan dari korban. Jika kerugian yang ditimbulkan tidak berat dan tidak menyebabkan kematian, maka kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan, termasuk untuk tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara dapat dihentikan penuntutannya apabila pelaku bukan residivis, ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun, dan terdapat perdamaian yang tulus antara korban dan pelaku. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial dan kompensasi terhadap korban.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2025 dengan informan Jaksa Penuntut Umum Dewa Kadek Dwi Naro Sigito, beliau menjelaskan bahwa:

“Kami di Kejaksaan Negeri Ende sudah menerapkan pendekatan ini dalam beberapa kasus, termasuk kasus penganiayaan. Tetapi tentu ada syaratnya, seperti kerugian tidak boleh lebih dari Rp2,5 juta dan pelaku harus sudah memberikan ganti rugi secara konkret. Proses perdamaian juga harus benar-benar murni, tanpa ada pungutan biaya apa pun dan tidak boleh ada tekanan dari pihak mana pun.”

Berdasarkan keterangan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif diharapkan mampu menyelesaikan perkara dengan lebih adil, humanis, dan sesuai nilai-nilai kemanusiaan, yang mencerminkan arah reformasi hukum progresif di Indonesia.

3.3 Analisis Studi Kasus

3.3.1 Kronologi Singkat Kasus penganiayaan Winda Dewanti

Kasus penganiayaan yang melibatkan Winda Dewanti diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Ende. Berdasarkan keterangan informan Kasubsi Pra Penuntutan dan Penuntutan, Rohmat Esa Hasan yang diambil dari proses wawancara pada tanggal 25 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa:

“proses berjalan lancar karena adanya kesepakatan damai antara pelaku (Winda) dan korban (Mirna), yang dimediasi oleh kejaksaan dengan melibatkan keluarga serta tokoh masyarakat seperti RT/RW dan Lurah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial secara damai.”

Namun, muncul kritik terhadap kualitas substantif mediasi tersebut. Informan Winda sendiri mengungkapkan bahwa akar konflik tidak digali secara mendalam, dan saksi kunci tidak diikutsertakan, sehingga menimbulkan kesan bahwa proses perdamaian lebih bersifat administratif daripada benar-benar substantif. Meskipun secara hukum kasus ini memenuhi syarat Pasal 5 huruf b dan d Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni ancaman pidana di bawah lima tahun dan adanya perdamaian sukarela namun

verifikasi terhadap ketulusan perdamaian dan pendalaman konflik dinilai masih lemah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2025 bersama informan Winda Dewanti, ia menjelaskan bahwa:

“Saya memang sudah bertemu langsung dengan korban sebagai bentuk iktikad baik. Tapi dari pihak kejaksaan, saya tidak mendapatkan penjelasan secara rinci atau evaluasi formal terkait kualitas perdamaian itu. Mereka hanya menjelaskan secara umum tentang proses *restorative justice*, tanpa merinci pasal-pasal hukum yang mendasarinya, tambahnya.”

Berdasarkan keterangan informan tersebut diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa meskipun secara prosedural kasus ini telah mengikuti jalur keadilan restoratif, dari sisi substansi masih terdapat kekosongan dalam penggalian motif dan verifikasi iktikad baik, yang penting agar proses perdamaian benar-benar berlandaskan keadilan sejati, bukan sekadar formalitas hukum.

3.3.2 Kronologi Singkat Kasus penganiayaan Rustam Efendi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 24 dan 25 Juni 2025, pada kasus penganiayaan yang melibatkan Rustam Efendi menunjukkan dinamika berbeda dibandingkan kasus serupa, seperti pada perkara Winda Dewanti. Dalam kasus ini, korban, Lily Nurlyah, menolak penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif dan memilih untuk melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Penolakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sikap tidak kooperatif, melainkan bentuk aspirasi korban terhadap keadilan substantif atas luka fisik dan psikis yang dialaminya. Ini mencerminkan bahwa tidak

semua perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian, terlebih jika korban merasa pemulihan yang ditawarkan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami.

Kegagalan mediasi dalam perkara ini mengindikasikan adanya batas efektivitas *restorative justice* dalam praktik. Muncul pertanyaan apakah mediasi yang difasilitasi Kejaksaan telah benar-benar menjunjung prinsip sukarela dan tanpa tekanan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Minimnya pengawasan eksternal dan tidak adanya mekanisme audit independen membuat proses mediasi rentan dianggap sekadar prosedural, bukan substansial. Hal ini dapat mengaburkan makna sebenarnya dari keadilan restoratif sebagai proses yang menjunjung nilai partisipatif dan keadilan yang menyeluruh.

Lebih jauh, intensitas kekerasan dalam kasus Rustam Efendi yang dilakukan berulang kali dan mengakibatkan luka serius menjadi catatan penting dalam menilai layak tidaknya *restorative justice* diterapkan. Meskipun secara hukum ancaman pidananya masih memenuhi syarat untuk *restorative justice*, namun secara etis dan substansial pendekatan tersebut patut dipertimbangkan ulang.

Berdasarkan hasil penelitian bersama Lily Nurlyah pada tanggal 21 Juni 2025, diketahui bahwa informan menolak untuk melakukan wawancara dengan peneliti karena trauma yang masih mendalam akibat peristiwa penganiayaan yang dialaminya, sehingga ia belum siap membahas apapun

yang berkaitan dengan permasalahannya. Penolakan ini diperkuat oleh fakta bahwa peneliti merupakan bagian dari pegawai Kejaksaan Negeri Ende, institusi yang terlibat dalam proses hukum kasusnya, yang membuat Lily merasa keberatan dan kurang nyaman untuk membuka cerita, meskipun peneliti telah mencoba membujuknya. Sikap Lily mencerminkan betapa sensitifnya kondisi psikologis korban dan pentingnya menghormati batas kesiapan korban dalam memberikan keterangan, khususnya pada kasus kekerasan yang menysakan luka fisik dan psikis serius. Hal ini juga menegaskan perlunya pendekatan yang lebih empatik dan sensitif dalam upaya pemulihan dan pencarian keadilan, agar korban tidak merasa tertekan atau terpaksa dalam proses penanganan hukum.

Penolakan Lily Nurlyah untuk diwawancarai menunjukkan dampak psikologis yang serius akibat pengalaman penganiayaan yang dialaminya, yang masih membekas dan mempengaruhi kesiapan mentalnya untuk berbicara tentang kejadian tersebut. Trauma yang mendalam ini tidak hanya menimbulkan ketakutan dan kecemasan, tetapi juga membuatnya enggan menghadapi proses yang berpotensi mengungkit luka lama. Selain itu, keberadaan peneliti sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Ende, yang secara langsung terlibat dalam penanganan kasus, menambah rasa tidak nyaman dan kekhawatiran Lily akan konsekuensi dari keterbukaan dirinya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak korban untuk menentukan kapan dan bagaimana mereka siap berbagi pengalaman mereka, tanpa tekanan dari pihak manapun. Sikap Lily menjadi cerminan bahwa

penanganan kasus kekerasan harus mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional korban secara serius, bukan semata-mata fokus pada aspek hukum formal. Oleh karena itu, pendekatan yang empatik, penuh pengertian, dan sensitif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan korban dapat berlangsung secara optimal, sekaligus menjamin bahwa pencarian keadilan tidak menambah beban psikologis bagi korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 24 dan 25 Juni 2025, peneliti menarik kesimpulan bahwa Ketidakseimbangan antara teori ideal dalam Peraturan Kejaksaan dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi mendalam, terutama agar prinsip pemulihan korban tidak dikorbankan demi efisiensi penyelesaian perkara.

3.4 Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan

3.4.1 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap sebagai wujud reformasi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, sebagaimana dijelaskan oleh Rohmat Esa Hasan (informan) dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025 di Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beliau menjelaskan bahwa:

“Peraturan ini tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk membangun ruang dialog, pemulihan relasi sosial, dan penyembuhan luka batin maupun fisik korban. Kejaksaan Negeri Ende telah mengimplementasikan ketentuan ini, terutama dalam kasus pidana ringan

seperti penganiayaan, selama memenuhi syarat formal seperti tidak adanya residivisme, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta adanya perdamaian yang tulus antar pihak.”

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penerapan di lapangan. Hal ini terlihat dari perbandingan dua kasus, yakni Winda Dewanti dan Rustam Efendi. Dalam kasus Winda, keadilan restoratif berhasil dijalankan dengan perdamaian dan penghentian penuntutan. Sebaliknya, pada kasus Rustam Efendi, korban menolak perdamaian, sehingga perkara tetap berlanjut ke pengadilan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara substantif apakah proses mediasi berjalan adil dan tanpa tekanan, dan apakah penolakan perdamaian mencerminkan luka yang belum pulih atau kurangnya upaya optimal dari pihak kejaksaan.

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Ketiadaan mekanisme objektif untuk menilai ketulusan para pihak serta minimnya supervisi independen membuka potensi penyimpangan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Dalam praktiknya, dapat terjadi ketimpangan kekuasaan atau pengaruh sosial yang memengaruhi hasil perdamaian, seperti dugaan yang muncul dalam kasus Winda Dewanti pasca keluarnya Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sistem pengawasan, penguatan transparansi, dan penegakan prinsip keadilan yang benar-benar berpihak pada pemulihan korban secara utuh, tanpa intervensi kekuasaan atau kompromi terhadap keadilan substantif.

3.4.2 Syarat dan Kriteria Perkara yang dapat dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 25 Juni 2025 bersama Rohmat Esa Hasan, informan menjelaskan bahwa:

“Perdamaian harus benar-benar mencerminkan itikad baik pelaku dan keinginan korban untuk pulih secara utuh, bukan semata formalitas administratif untuk menghentikan proses hukum.”

Meski secara normatif syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam beberapa kasus, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan signifikan, seperti dalam kasus Rustam Efendi di mana korban menolak berdamai, dan dalam kasus Winda Dewanti yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemurnian proses perdamaian. Hal ini menandakan bahwa walaupun Kejaksaan mengklaim telah menerapkan peraturan kejaksaan dengan baik, evaluasi objektif terhadap pelaksanaan dan efektivitas keadilan restoratif sangat diperlukan untuk menghindari ketimpangan perlakuan terhadap korban.

Lebih lanjut, Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwa perkara yang membahayakan nyawa atau mengakibatkan kematian tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Oleh karena itu, dalam kasus penganiayaan, jaksa tidak hanya mempertimbangkan ancaman pidana secara formil, tetapi juga intensitas dan

dampak kekerasan yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak boleh dilaksanakan secara kaku atau birokratis, tetapi harus memperhatikan konteks sosial, etik, dan psikologis dari kasus yang ditangani.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan informan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa Kejaksaan perlu memperkuat standar penilaian, transparansi proses, dan penghormatan terhadap hak-hak korban agar penerapan keadilan restoratif benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif dan bermakna.

3.5 Mekanisme Penegakan Hukum melalui Pendekatan Restoratif

3.5.1 Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Penganiayaan

Prosedur penanganan perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2025 bersama informan Dewa Kadek Dwi Naro Sigitto selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ende, ia menjelaskan bahwa:

“Prosesnya dimulai dari penelitian berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepolisian, ujanya. Kami menilai kelengkapan formil dan materiil, termasuk jenis tindak pidana, karakter pelaku, serta dampaknya terhadap korban. Kalau perkara itu memenuhi kriteria, seperti pelaku bukan residivis, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, dan ada kesepakatan damai yang dilakukan secara sukarela, maka perkara bisa diajukan untuk penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif.”

Keadilan restoratif dipandang sebagai solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, dibanding sekadar penghukuman. Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Ende, pendekatan ini hanya diterapkan pada kasus penganiayaan ringan yang kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah dan telah disertai dengan bentuk pemulihan nyata dari pelaku, seperti penggantian biaya pengobatan atau hilangnya pendapatan korban. Setelah kesepakatan tercapai, jaksa akan mengusulkan penghentian penuntutan ke Kepala Kejaksaan Negeri, dengan menyertakan dokumen perdamaian dan bukti pemulihan kerugian. Penghentian penuntutan baru akan diterbitkan jika seluruh syarat formil dan substantif telah terpenuhi.

Namun, hasil penelitian juga mengungkap bahwa penerapan prosedur ini sangat bergantung pada kehendak korban. Dalam kasus Winda Dewanti, proses berjalan lancar karena ada perdamaian tulus. Sebaliknya, dalam kasus Rustam Efendi, meskipun syarat formil terpenuhi, korban menolak berdamai sehingga proses keadilan restoratif tidak dapat diterapkan.

Dengan keterangan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini menegaskan prosedur restorasi jastis bersifat fleksibel tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip sukarela dan perlindungan hak korban, serta menuntut sensitivitas jaksa dalam menilai setiap kasus secara holistik.

3.5.2 Proses Mediasi antara Pelaku dan Korban

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan Rohmat Esa Hasan pada tanggal 24 Juni 2025, Kasubsi Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ende, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya melihat bahwa proses mediasi antara pelaku dan korban merupakan inti dari penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan, ujarnya. Mediasi ini menjadi ruang yang sangat penting untuk membangun dialog, pengakuan kesalahan, dan kesepakatan pemulihan antara kedua belah pihak. Kami di Kejaksaan Negeri Ende selalu menjalankan proses mediasi ini secara sukarela dan tanpa tekanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jelasnya. Namun memang, dalam praktiknya, kami sering menghadapi tantangan yang cukup kompleks di lapangan.”

Kasus Winda Dewanti berhasil diselesaikan melalui mediasi dan perdamaian, sedangkan kasus Rustam Efendi gagal karena korban menolak berdamai, meskipun proses mediasi telah difasilitasi.

Kegagalan mediasi dalam kasus Rustam memperlihatkan bahwa belum ada mekanisme evaluasi yang objektif untuk menilai alasan penolakan korban, apakah disebabkan oleh trauma, tekanan sosial, atau kehendak pribadi. Kejaksaan juga belum memiliki sistem yang optimal untuk membangun komunikasi empatik dan ruang aman bagi korban dalam proses ini. Padahal, keberhasilan mediasi tidak cukup hanya mempertemukan pihak-pihak, tetapi juga menuntut kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya serta kesungguhan dalam memulihkan kerugian korban, baik fisik, psikologis, maupun material. Semua bentuk pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku sepenuhnya.

Berdasarkan keterangan dari informan tersebut diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa perbedaan hasil antara dua kasus tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap konsistensi dan transparansi mediasi. Dalam kasus Winda, cepat keluarnya surat perintah dari Kepala Kejaksaan menimbulkan dugaan adanya pengaruh struktural dalam proses yang seharusnya netral. Hal ini menekankan pentingnya adanya audit independen atau supervisi eksternal dalam proses mediasi, agar keadilan restoratif tidak sekadar menjadi prosedur administratif, tetapi benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.

3.6 Perspektif Hak Korban dalam Penerapan Keadilan Restoratif

3.6.1 Kebutuhan Korban Atas Keadilan Substantif Dibanding Formalisme Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Rohmat Esa Hasan dari Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 25 Juni 2025, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam perkara penganiayaan, korban umumnya lebih mengharapkan bentuk keadilan yang substantive yakni pemulihan nyata atas kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi daripada sekadar melihat pelaku dijatuhi hukuman secara formal. Sistem hukum konvensional yang menekankan pada penghukuman seringkali mengabaikan hak dan kebutuhan korban, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses peradilan.”

Melalui penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya Pasal 14 yang berbunyi “Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut

Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.” Kejaksaan diberi ruang untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang lebih manusiawi, selama ada perdamaian yang tulus dan pemulihan nyata dari pelaku kepada korban.

Dalam praktiknya, keadilan substantif ini tampak berhasil diterapkan dalam kasus Winda Dewanti, di mana perdamaian dicapai secara sukarela dan korban merasa keadilannya terpenuhi. Namun, hal berbeda terjadi dalam kasus Rustam Efendi, di mana korban menolak berdamai karena merasa tidak mendapatkan pemulihan yang cukup, baik secara materiil maupun moral. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya dokumen perdamaian tidak selalu menjamin terpenuhinya rasa keadilan korban.

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dibutuhkan mekanisme evaluasi yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memastikan bahwa perdamaian bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan terpenuhinya keadilan substantif bagi korban. Tanpa langkah tersebut, pendekatan keadilan restoratif berisiko menjadi prosedur administratif belaka yang gagal menjawab kebutuhan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

3.6.2 Evaluasi Terhadap Penghormatan Hak-Hak Korban Selama Proses

Hasil wawancara dengan informan Rohmat Esa Hasan pada tanggal 25 Juni 2025 dari Kejaksaan Negeri Ende menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak-hak korban merupakan elemen penting dalam

penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus penganiayaan. Upaya pemulihan dilakukan melalui pemberian biaya pengobatan, ganti rugi atas kerugian ekonomi, serta pelaksanaan mediasi yang bersifat sukarela sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Namun, masih muncul pertanyaan apakah seluruh proses ini dijalankan secara substantif atau hanya sebagai formalitas administratif belaka.

Dalam kasus Winda Dewanti, korban terlibat aktif dalam proses mediasi dan merasa puas dengan pemulihan yang diterima, menunjukkan bahwa hak-haknya cukup dihormati. Sebaliknya, dalam kasus Rustam Efendi, korban menolak berdamai dan memilih jalur litigasi, mencerminkan bahwa pemulihan materil saja tidak selalu memadai. Kejaksaan menghormati keputusan korban tersebut, tetapi absennya mekanisme pengawasan independen menimbulkan kekhawatiran atas potensi tekanan sosial atau ekonomi yang mungkin memengaruhi persetujuan damai dalam kasus lain.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Ketimpangan hasil antara dua perkara serupa dapat

memunculkan persepsi inkonsistensi dan ketidakadilan dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu menjamin bahwa seluruh proses berjalan tanpa pungutan, tanpa intervensi, serta fokus sepenuhnya pada kepentingan dan pemulihan korban, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

3.6.3 Potensi Tekanan Atau Intimidasi Yang Menyertai Penolakan Damai

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende, terdapat potensi tekanan atau intimidasi terhadap korban, khususnya saat mereka menolak untuk berdamai. Berdasarkan wawancara dengan informan Jaksa Penuntut Umum Dewa Kadek Dwi Naro Sigito, beliau menjelaskan bahwa:

“Meskipun Pasal 3 ayat 3 huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi “Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif” menegaskan bahwa perdamaian harus bersifat sukarela, kenyataannya di lapangan sering kali berbeda. Dalam masyarakat kecil seperti di Kabupaten Ende, korban yang menolak damai sering menghadapi tekanan sosial, dominasi ekonomi pelaku, atau relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang terselubung.”

Contoh nyata terlihat dalam kasus Rustam Efendi, di mana korban Lily Nurlyah menolak berdamai meskipun telah difasilitasi melalui mediasi. Penolakan tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh tekanan implisit dari lingkungan atau pihak pelaku. Tekanan semacam ini, meskipun tidak langsung terlihat, berisiko mengaburkan hak korban untuk memperoleh keadilan substantif. Sementara secara normatif jaksa diwajibkan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keseimbangan sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 Peraturan Kejaksaan, belum ada mekanisme pengawasan independen yang dapat menjamin bahwa proses tersebut benar-benar bebas dari pengaruh luar atau intimidasi.

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, maka peneliti menegaskan pentingnya peran jaksa sebagai pelindung hak korban, bukan sekadar fasilitator teknis. Keputusan korban untuk tidak berdamai harus dihormati sepenuhnya sebagai bentuk ekspresi bebas dan sah. Bila prinsip sukarela diabaikan demi alasan efisiensi atau harmoni sosial semu, maka keadilan restoratif akan kehilangan maknanya. Diperlukan mekanisme verifikasi atas keikhlasan para pihak dan perlindungan konkret bagi korban agar keadilan restoratif dapat dijalankan secara utuh dan bermakna.